

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Sejak bergabungnya Inggris dengan EC (sekarang UE) pada tahun 1973, negara ini berada dalam posisi yang berbeda dengan negara anggota lainnya terkait permasalahan Eropa. Sikap berbeda ditunjukkan oleh Inggris yang sering mengingkari kebijakan – kebijakan Uni Eropa, pada dasarnya Inggris tidak menginginkan adanya integrasi lebih mendalam dan membentuk Eropa menjadi sebuah negara federal seperti AS dengan alasan kedaulatan dan nasionalisme. Alasan bergabungnya Inggris dengan EC pada tahun 1973 didasari krisis ekonomi pasca perang. Walaupun sebelumnya Inggris telah membuat EFTA (*European Free Trade Association*) pada tahun 1959 bersama dengan Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, dan Swiss, Inggris masih tertinggal dari 6 anggota yang membentuk ECSC.

Kebijakan – kebijakan Inggris terhadap Uni Eropa seringkali dipengaruhi politik domestik kelompok – kelompok euroskeptis. Kelompok oposisi ini telah ada semenjak sebelum Inggris bergabung dengan EC, tepatnya pada masa pengaplikasian Inggris menjadi anggota EEC. Pada waktu itu pihak oposisi diwakili oleh *Anti-marketers* yang terdiri dari berbagai macam kelompok seperti ACML, GBO, dan FBM. Kelompok – kelompok ini aktif mengkampanyekan pandangan – pandangan skeptis dan pesimis terhadap proyek integrasi Eropa. NRC sebagai organisasi *Anti-marketers* yang dibentuk sebagai oposisi terhadap kelompok pro-Eropa pada masa pemerintahan Harold Wilson (1975), aktif mengkampanyekan “*no vote*” sebelum referendum keanggotaan Inggris dalam EC

diadakan pada waktu itu. Pada akhirnya kelompok tersebut dibubarkan karena mengalami kekalahan dalam *in/out referendum* 1975.

Pada masa pemerintahan konservatif Margaret Thatcher, sikap skeptis dan pesimis terhadap integrasi Eropa kembali muncul dan berkembang ditandai dengan *Bruges Speech* yang pada akhirnya memunculkan istilah *euroscepticism* pada tahun 1989 di majalah *the times*. *Bruges Speech* menimbulkan intersubjektivitas terhadap berbagai macam agen, agen – agen yang terpengaruh dengan *Bruges Speech* membentuk sebuah kelompok yang dinamakan *Bruges Group*. Sejak saat itu *euroscepticism* terus berkembang dan menjalar ke berbagai negara Eropa.

Puncaknya, perdebatan mengenai integrasi Eropa antara pihak pro-Eropa dengan pihak euroskeptis berujung kepada sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri David Cameron pada tahun 2013 yang mana akan mengadakan referendum serupa seperti pada tahun 1975. Sebelum referendum yang direncanakan akan diadakan pada Juni 2016 tersebut, Inggris akan menegosiasikan kembali hubungannya dengan Uni Eropa. Akan tetapi, keputusan tetap berada di tangan publik Inggris. Fenomena ini dikenal dengan *British Exit* (*Brexit*).

Dengan paradigma konstruktivisme, peneliti menganalisis bahwa *British Exit* adalah sebuah konstruksi sosial yang direpresentasikan oleh aspek ide. Ide dalam hal ini adalah *euroscepticism* yang mengkonstruksi sebuah wacana yang dinamakan *Brexit*. Wacana sendiri adalah sebuah tindakan (*practice*) yang menimbulkan intersubjektivitas dalam struktur sosial, yang mana *practice* itu sendiri lahir dari manifestasi *interest*.

Menurut Alexander Wendt, anarki dalam Hubungan Internasional bukanlah sesuatu yang bersifat *given*, akan tetapi apa yang terjadi dalam struktur sosial baik dalam struktur domestik maupun internasional merupakan sebuah konstruksi yang terbentuk melalui interaksi antar-agen. Jadi, *eurocepticism* dan *Brexit* terbentuk dikarenakan adanya interaksi antara Inggris dan Uni Eropa. Negara merupakan agen sentral yang dapat menggunakan kebijakannya dalam interaksi antaragen dalam struktur sosial. Kebijakan negara bersifat sangat mengikat khususnya bagi agen lain yang merupakan warga negara yang bersangkutan seperti individu maupun kelompok seperti halnya masyarakat Inggris. Jadi, bagaimanapun perdebatan dan interaksi yang terjadi dalam struktur sosial Inggris, *practice* yang terbentuk dari interaksi tersebut ditentukan oleh Perdana Menteri Inggris yang sedang menjabat sebagai representasi negara.

Hal ini seperti yang dikatakan dalam perspektif konstruktivisme bahwa *practice* baik dalam bentuk kebijakan negara maupun tindakan agen dalam bentuk lain lahir dari *interest* akibat dari perbedaan *identity* dan ide yang dibangun oleh nilai, norma, agama, ideologi dan sebagainya yang diyakini para agen yang juga didapatkan dalam interaksinya dalam struktur sosial yang dapat dilihat melalui *meanings* dalam interaksi antaragen yang mengandung simbol. Simbol tersebut antaranya adalah ungkapan – ungkapan yang disampaikan agen. Dalam penelitian ini adalah Perdana Menteri Inggris David Cameron sebagai representasi negara yang memunculkan wacana *British Exit*.

Identitas sangat dipengaruhi oleh ide yang dimiliki agen. Nilai, norma, agama, ideologi dan sebagainya akan membangun identitas dari agen yang berujung pada munculnya *interest* dan *practice*. Dalam *practice*, pada hakikatnya

terjadi *shared idea* berupa ide yang bersumber dari beberapa aspek yang membangun identitas agen. Itulah sebabnya interaksi antaragen terkadang dapat merubah identitas dari salah satu agen. Artinya ide yang diyakini oleh agen yang mempengaruhi agen lain tersebut berhasil didistribusikan pada interaksi dalam struktur sosial. Itu pulalah yang menjadi penyebab kenapa *identity* dari agen sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan. Hal tersebut terbukti pada pemerintahan *new labour* (1997 – 2009) yang ingin menjadikan Inggris sebagai negara pro-Eropa. Akan tetapi, ideologi euroskeptis dari kelompok – kelompok oposisi telah mengakar kuat di Inggris dan menyebabkan perubahan identitas menjadi negara pro-Eropa tidak berlangsung lama. Karena pada masa pemerintahan koalisi konservatif – liberal demokrat Inggris kembali menjadi negara euroskeptis.

*Euroscepticism* di era modern ini menjadi instrumen dalam rangka mendapatkan kepentingan. Contohnya saja permintaan Inggris agar perjanjian Lisbon diratifikasi, jika perjanjian tersebut tidak segera diratifikasi, David Cameron akan mengadakan referendum dan mengkampanyekan “*no vote*”. Itulah bagaimana interaksi yang terjadi dalam struktur sosial Inggris dan Uni Eropa yang pada akhirnya melahirkan sebuah wacana yang dinamakan *British Exit*. Referendum yang akan diadakan pada 28 Juni 2016 tersebut mengaktifkan agen – agen euroskeptis seperti *Leave.EU*, *Vote Leave*, *Grassroot Out*, dan UKIP untuk mengkampanyekan ‘*no vote*’. Sebaliknya *Britain Stronger in Europe* dengan dukungan perdana menteri mengkampanyekan ‘*yes vote*’. Apakah Inggris akan benar – benar keluar dari keanggotaan Uni Eropa? Semua ada ditangan masyarakat Inggris pada referendum yang akan diadakan pada 28 Juni 2016.

## 5.2 Saran

Permasalahan yang terjadi di kontinen Eropa merupakan permasalahan yang kompleks. Berdasarkan sejarah, Eropa adalah negara – negara yang dulunya berbentuk kekaisaran, terutama Inggris. Inggris memiliki sejarah yang panjang dan kebanggaan tersendiri sebagai emperium besar berabad – abad lamanya. Akan tetapi pasca perang dunia kedua Inggris tidak lagi sebuah emperium. Keruntuhan emperium menyebabkan krisis yang mendalam terhadap Inggris. Hasilnya Inggris harus merasakan krisis ekonomi pasca perang. Akhirnya Inggris memilih untuk bergabung dengan EC untuk mempermudah rekonstruksi. Tidak mudah bagi Inggris untuk menyerahkan kedaulatannya begitu saja kepada sebuah organisasi kawasan yang sebenarnya secara kontinental terpisah dari Inggris. Hal ini sangat menarik untuk dikaji bagi peneliti. Akan tetapi peneliti masih jarang menemukan ilmuwan Hubungan Internasional yang mengkaji tentang hal ini.

*British Exit* tidak boleh disepelekan oleh negara anggota negara Uni Eropa lainnya. Uni Eropa sebagai organisasi kawasan yang dianggap ideal dan menjadi acuan bagi organisasi kawasan lainnya di dunia, harus bisa mengatasi dan menghentikan kemungkinan *Brexit* akan terjadi. UE harus mengambil langkah cepat dan menegosiasikan kembali hubungan dengan Inggris. Karena sebagai negara yang berpengaruh dan berperan besar dalam ekonomi politik Eropa, *Brexit* tentunya akan menjadi batu yang akan menghantam Uni Eropa dan hal tersebut tentunya akan sangat merugikan Uni Eropa. Kemudian, negara – negara Uni Eropa harus bisa menciptakan oposisi yang kuat terhadap gerakan euroskeptis yang berada dalam tubuh negara tersebut, khususnya Inggris.

Penelitian ini masih terbatas dan masih banyak kekurangan. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih menelusuri lagi bahan – bahan dari sumber yang variatif. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda.

